



RENJA **Perubahan** **2025**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan Waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

Perubahan Renja disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan seluruh kepentingan OPD. Perubahan Renja bertujuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan, agar pelaksanaannya sesuai dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Perubahan Renja merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Perubahan Renja Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Disadari bahan penyusunan Perubahan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan pendapat yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya pada tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Gunung Tua, 28 Juli 2025



KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IRHAN SIEPEGAR, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650903 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	9
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan maksud sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang menyangkut bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan selama satu tahun berjalan dengan tujuan agar Program Kegiatan dapat terencana, terarah dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Maksud dari disusunnya suatu Rencana kerja adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip;
- Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD;
- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pilihan opd;
- Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat;
- Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Untuk menyeragamkan langkah Perencanaan Pembangunan yang akan dilakukan di Daerah yang didasarkan pada perencanaan pusat, provinsi dan daerah terkait dengan Tupoksi OPD yang di emban;
- Memberikan arah,tujuan,sasaran strategis kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
- Tersedianya arah kebijakan teknis di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
- Untuk menilai dan melihat Kesenambungan Program OPD terhadap Kesejahteraan Rakyat;
- Sebagai Dokumen dasar bagi OPD terhadap tindakan Pengawasan dan sekaligus alat Monitor dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Negara dan Daerah terhadap Perencanaan Kegiatan dan Program serta Implementasinya di Masyarakat;
- Sebagai bahan dasar bagi OPD untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan di masyarakat dan sebagai bahan masukan untuk OPD dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari 4 (Empat) Bab dan memuat beberapa Sub Bab antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Sampai triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 s/d Triwulan II untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra 2024-2025		Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Trivulian				Realisasi capaian kinerja 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2024-2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024-2025					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	14,00%	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN																							
2.07.0.3	Tenwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	terpenuhinya pencari kerja yang produktif	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	15	27.000.000	47	575.708.600	-	-	-	-	-	62	602.708.600	162	1.602.708.600			
2.07.0.3.1		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Tan So Kah, Pulau	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	15	27.000.000	47	575.708.600	-	-	-	-	-	62	602.708.600	162	1.602.708.600			
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemiri Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	15	27.000.000	47	575.708.600	-	-	-	-	-	-	62	602.708.600	162	1.602.708.600		
2.07.0.5	Atis, Tenwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PENETAPAN UMNAS	8	599.294.400	8	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	599.294.400			
0.70.5.1		Pengawasan Pelaksanaan Perusahaan Dan Pendaftaran Perijinan Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Forml Pasrah Kabupaten Jorja	Jumlah Dokumen Upah Minimum Kabupaten	8	599.294.400	8	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	599.294.400			
0.70.5.1.1		Pemantauan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguipahan Perorangan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PS, Struktur Skala Upah, dan US Beperti) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Penguipahan Perorangan	8	599.294.400	8	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	599.294.400			
2.17.0.1	Tenwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jorja	69	696.991.773	64	481.047.900	23	121.610.993	19	109.473.638	0	-	-	-	-	42	231.084.631	111	928.076.404			
2.17.0.1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	25.815.100	6	23.158.300	4	2.728.300	1	5.107.500	-	-	-	-	-	5	7.835.800	11	33.650.900			
2.17.0.1.2.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	4	3.015.100	4	2.728.300	4	2.728.300	-	-	-	-	-	-	-	4	2.728.300	8	5.743.400			
2.17.0.1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	22.800.000	2	20.430.000	-	-	1	5.107.500	-	-	-	-	-	1	5.107.500	3	27.907.500			
2.17.0.1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23	399.746.547	23	198.693.700	6	63.168.150	6	33.538.600	-	-	-	-	-	12	96.706.750	35	496.453.297			
2.17.0.1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.132.000	1	6.652.400	-	2.265.800	-	-	-	-	-	-	-	-	2.265.800	1	8.397.800			
2.17.0.1.4.2		Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	74.651.400	2	53.575.500	1	20.430.300	1	6.171.900	-	-	-	-	-	2	26.602.200	4	101.253.600			
2.17.0.1.4.3		Penyediaan Perakitan Rumah Tanaka	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tanaka yang Disediakan	1	5.641.000	1	6.773.000	-	2.297.100	-	-	-	-	-	-	-	-	2.297.100	1	7.938.100			
2.17.0.1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	27.993.600	2	27.993.600	1	6.386.400	1	6.998.400	-	-	-	-	-	2	13.384.800	4	41.378.400			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	16.695.800	2	18.266.800	-	4.820.300	1	2.060.900	-	-	-	-	-	1	6.881.200	3	23.577.000			
2.17.0.1.4.6		Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan yang Disediakan	3	20.597.000	3	20.597.000	1	5.140.250	-	-	-	-	-	-	-	1	5.140.250	4	25.746.250			
		Pemantauan dan Koordinasi SIPD	Jumlah Laporan dan Koordinasi SIPD	12	248.035.747	12	64.835.400	3	21.819.000	3	18.307.400	-	-	-	-	-	6	40.126.400	18	288.162.147			
2.17.0.1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	119.420.000	3	108.110.000	1	18.260.000	2	26.730.000	-	-	-	-	-	3	44.990.000	6	164.410.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	2	95.960.000	2	97.960.000	1	16.260.000	1	23.940.000	-	-	-	-	-	2	40.200.000	4	136.160.000			
2.17.0.1.6.2		Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lembar yang Disediakan	Jumlah Perakitan dan Mesin Lembar yang Disediakan	1	23.460.000	1	10.150.000	-	2.000.000	1	2.790.000	-	-	-	-	-	1	47.900.000	2	28.250.000			

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Rencana 2024-2025		Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi capaian kinerja 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2024-2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024-2025	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	14.00%	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		13	
2.17.01.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	11.086.400		11.086.400	-	-	3	11.086.400	-	-	-	-	-	-	3	11.086.400	8	22.172.800		
2.17.01.7.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Didapatkan	5	11.086.400	3	11.086.400	-	-	3	11.086.400	-	-	-	-	-	-	3	11.086.400	8	22.172.800		
2.17.01.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negeri	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negeri	25	111.725.726	25	119.981.200	6	23.015.448	6	27.431.938	0	-	-	-	-	-	12	50.447.381	37	162.173.107		
2.17.01.5.1		Penyediaan Jasa Surat, Monev, dan Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat, Monev, dan Laporan	1	1.200.000	1	1.300.000	-	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	1	1.850.000		
2.17.01.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didapatkan	12	41.284.526	12	40.440.000	3	10.825.248	3	10.121.638	-	-	-	-	-	-	6	20.946.881	18	62.231.407		
2.17.01.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didapatkan	12	69.241.200	12	69.241.200	3	11.540.200	3	17.310.300	-	-	-	-	-	-	6	28.850.500	18	98.091.700		
2.17.01.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7	20.198.000	7	20.018.300	6	14.439.100	1	5.579.200	-	-	-	-	-	-	7	20.018.300	14	49.216.300		
2.17.01.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	8.751.100	2	5.489.200	2	5.489.200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.489.200	4	14.240.300		
2.17.01.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS/KPD	Jumlah Dokumen RKAS/KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS/KPD	2	3.650.800	2	4.176.600	2	4.176.600	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.176.600	4	7.827.400		
2.17.01.1.3		Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Jumlah Dokumen DPA/SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA/SKPD	2	6.043.000	2	4.773.300	2	4.773.300	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.773.300	4	10.816.300		
2.17.01.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	10.753.100	1	5.579.200	-	-	1	5.579.200	-	-	-	-	-	-	1	5.579.200	2	16.332.300		
2.17.06	666 Terevisi	PROGAM PEMBIAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi	0	0	388	970.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.06.1		Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Negeri	Koperasi dengan Keanggotaannya dalam Kabupaten/Negeri	0	0	388	970.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.06.1.4		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Kabupaten/Negeri	Koperasi dengan Keanggotaannya dalam Kabupaten/Negeri	0	0	388	970.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.08	Terevisi	PROGAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	0	0	6	92.258.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.06.1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kabupaten/Negeri	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0	0	6	92.258.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.06.1.2		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar	0	0	6	92.258.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
JHON SIREGAR, S.Sos, N.S.
NIP.19650903 19802 1 003

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang didalam RPD dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah. dengan prioritas yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam dokumen Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan menetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Uaha Kecil dan Menengah.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan sektor Koperasi ,UKM dan Ketenagakerjaan adalah:

- Sektor Koperasi
 - a. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini
 - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi.

- d. Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompok ekonomi produktif
- e. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi Masyarakat
- Sektor UKM :
 - a. Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakat
 - b. Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swasta.
 - d. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menengah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat
 - e. Pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.
- Sektor Ketenagakerjaan
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
 - b. Memberikan Pengetahuan Kepada Pencari Kerja dengan Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan.
 - c. Mengurangi Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja
 - d. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada
 - e. Menyebarkan Informasi pasar kerja 3.2.2.

Sasaran

- a. Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative – Minded) 31 Rencana Kerja 2025 KUKMK
- b. Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)
- c. Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
- d. Meningkatkan kualitas dan Produktivitas Ketenagakerjaan
- e. Memberikan Pengetahuan kepada pencari kerja dengan mengadakan kegiatan pelatihan Keterampilan
- f. Mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja
- g. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada

- h. Mengidentifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi dan sekitarnya
- j. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat eks Transmigrasi dengan Masyarakat Sekitar.

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun) yang selanjutnya akan menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah selama satu tahun yang terakumulasi dalam 3 tahun renstra, dirumuskan sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4			
	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dalam upaya peningkatan kualitas koperasi usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22%	71,22%	76,22%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5%	90,5%	90,5%
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,62%	1%	51%
		Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	43%	48%	53 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan maka program yang akan dilakukan adalah :

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Perkembangan UMKM

Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pemeliharaan barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
8. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya (satu)Daerah Kabupaten /Kota
9. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan disajikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Pendanaan. Pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara**

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Rencana Pagu Indikatif		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN										
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	tercapainya pencari kerja yang produktif	tercapainya pencari kerja yang produktif			100	100	1.000.000,000	1.000.000,000	-
2.07.03.1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Tari Se Kab. Paksi	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Tari Se Kab. Paksi			100	100	1.000.000,000	1.000.000,000	-
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasifikasi Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100	100	1.000.000,000	1.000.000,000	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PENETAPAN UMKAB	PENETAPAN UMKAB			8	8	600.000,000	600.000,000	-
07.05.1	Pengesahan Penetapan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Harap Satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Upah Minimum Kabupaten	Jumlah Dokumen Upah Minimum Kabupaten			8	8	600.000,000	600.000,000	-
07.05.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamstok serta Perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamstok serta Perusahaan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	8	8	600.000,000	600.000,000	-
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			76	76	2.482.951,891	2.529.663,891	46.712.000
2.17.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18	18	2.025.062,291	2.049.814,291	24.752.000
2.17.01.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12	12	2.001.903,991	2.026.655,991	24.752.000
2.17.01.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	20.430,000	20.430,000	-
2.17.01.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4	4	2.728,300	2.728,300	-
2.17.01.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			23	23	198.693,700	220.653,700	21.960.000
2.17.01.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1	1	6.652,400	6.652,400	-
2.17.01.4.2	Penyediaan Penalatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Penalatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penalatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	53.575,500	74.501,500	20.926.000
2.17.01.4.3	Penyediaan Penalatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penalatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Penalatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1	1	6.773,000	6.773,000	-
2.17.01.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	27.993,600	27.993,600	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	18.266,800	19.300,800	1.034,000
2.17.01.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3	3	20.597,000	20.597,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12	12	64.835,400	64.835,400	-
2.17.01.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3	3	108.110,000	108.110,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	97.960,000	97.960,000	-
2.17.01.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1	1	10.150,000	10.150,000	-
2.17.01.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terkelaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terkelaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.086,400	11.086,400	-
2.17.01.7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3	3	11.086,400	11.086,400	-

**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Lokal		Target Capaian Kinerja		Rencana Pagu Indikatif		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25	25	119.981.200	119.981.200	-
2.17.01.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1	1	1.300.000	1.300.000	-
2.17.01.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12	12	49.440.000	49.440.000	-
2.17.01.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12	12	69.241.200	69.241.200	-
2.17.01.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			7	7	20.018.300	20.018.300	-
2.17.01.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	5.489.200	5.489.200	-
2.17.01.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	4.176.600	4.176.600	-
2.17.01.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2	2	4.773.300	4.773.300	-
2.17.01.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1	1	5.579.200	5.579.200	-
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif			-	388	-	200.000.000	200.000.000
2.17.05.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina	Jumlah koperasi yang dibina			-	388	-	200.000.000	200.000.000
2.17.02.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Jumlah pengurus koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	388	-	200.000.000	200.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pernerdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pernerdayaan dan Perlindungan Koperasi			388	388	970.000.000	970.000.000	-
2.17.06.1	Pemerdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terbentuk	Jumlah koperasi yang terbentuk			388	388	970.000.000	970.000.000	-
2.17.06.1.4	Facilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan dalam Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	388	388	970.000.000	970.000.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM			6	6	92.258.600	170.298.600	78.040.000
2.17.06.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			6	6	92.258.600	170.298.600	78.040.000
2.17.06.1.2	Pengembangan Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	6	6	92.258.600	170.298.600	78.040.000
Jumlah								5.145.210.491	5.469.962.491	324.752.000

Gunung Tua,
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
IRHAN SIREGAR, S.Sos, M.Si.
NIP. 19650903 198602 1 003

BABI V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hal terkait dengan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu :

1. Dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta diupayakan dapat meningkat setiap tahun mengingat sasaran program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Jika kondisi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan program, maka dalam penyusunan program akan ditetapkan skala prioritas kegiatan yang sangat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan Masyarakat.
2. Untuk kelancaran kegiatan dalam perumusan kegiatan selalu memperhatikan usulan kegiatan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan melalui forum musrenbang, juga memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis pada setiap program / kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
3. Rencana Tindak lanjut dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan adalah :
 - Evaluasi terhadap keseluruhan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi program/kegiatan selanjutnya Rencana Kerja 2025 KUKMK 62
 - Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis bagi staf yang melaksanakan kegiatan teknis mengingat program/kegiatan senantiasa ada perubahan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Gunung Tua, 28 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



TIJAN SIREGAR, S.Sos, M.Si.
NIP. 19650903 198602 1 003